

**ANALISIS CODE OF CONDUCT ON FRAMEWORK FOR SECURITY  
COOPERATION (COC) INDONESIA DENGAN AUSTRALIA TERKAIT  
KASUS PENYADAPAN TAHUN 2013-2014**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik*

*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

*Universitas Andalas*

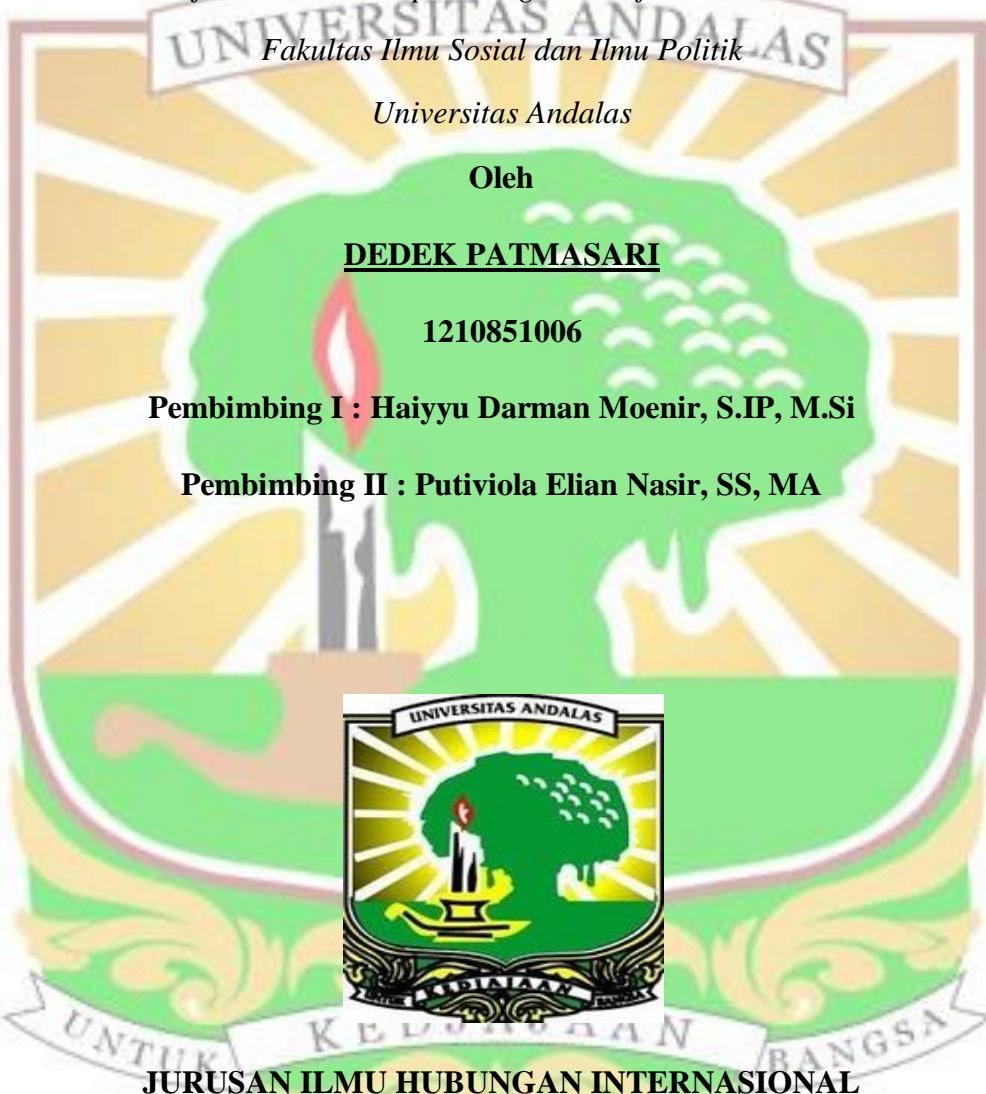
**Oleh**

**DEDEK PATMASARI**

**1210851006**

**Pembimbing I : Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si**

**Pembimbing II : Putiviola Elian Nasir, SS, MA**



**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2017**

## ABSTRAK

### ANALISIS CODE OF CONDUCT ON FRAMEWORK FOR SECURITY COOPERATION (COC) INDONESIA DENGAN AUSTRALIA TERKAIT KASUS PENYADAPAN TAHUN 2013-2014

Penelitian ini melihat alasan Indonesia membuat *Code Of Conducton Framework For Security Cooperation* (COC) terkait kasus penyadapan dengan Australia. Penyadapan merupakan pelanggaran keamanan dan kedaulatan Indonesia serta melanggar *Lombok Treaty*, Konvensi Wina 1961 dan hukum kebiasaan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan mengapa Indonesia membuat *Code of Cunduct on Framework for Security Cooperation* (COC). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data guna menemukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu fenomena. Penulis menggunakan konsep *State Behaviour* oleh Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, dimana konsep ini memiliki enam indikator untuk melihat perilaku negara dalam membuat kebijakan, diantaranya: kepentingan, tujuan, ancaman, peluang, kebijakan dan kemampuan. Peneliti menemukan bahwa Indonesia memiliki kepentingan nasional yang harus diwujudkan dalam penyelesaian perselisihan dengan Australia, yaitu menegakkan keamanan dan kedaulatan Indonesia dengan membuat kode etik yang bertujuan untuk menghindarkan Indonesia dari ancaman penyadapan. Melalui ancaman tersebut Indonesia memiliki peluang untuk membuat perjanjian internasional yang baru dengan Australia. Indonesia memiliki kemampuan politik untuk memanfaatkan pelanggaran yang dilakukan oleh Australia guna memperlihatkan komitmenya ke pada negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik dan ASEAN, yaitu mengutamakan penyelesaian perselisihan secara damai, Indonesia dipandang sebagai negara yang berkomitmen.

**Kata Kunci:** Penyadapan, *State Behaviour*, Indonesia, Australia.

## **ABSTRACT**

### **ANALISYS OF CODE OF CONDUCT ON FRAMEWORK FOR SECURITY COOPERATION (COC) INDONESIA WITH AUSTRALIA RELATED WIRETAPPING YEAR 2013-2014**

This research is to determine Indonesia's motive in establishing the Code of Conduct on framework for security cooperation (COC) with Australia concerning wire taping case. The taping is an violation of security and Indonesia sovereignty as well as infraction of the Lombok Treaty, Vienna Convention 1961, and also International Custom Law. This reasearch sims to explain Indonesia's Motive in making Code of Cunduct on Framework for Security Cooperation (COC). The research methodology that is used in this research is qualitative method by collecting data to discover factors that caused a certain phenomenon. The concept used is State Behavior by Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, which has six indicator in decision making process, such; interest, objectives, threats, opportunitie, policy, and capabilities. The reasearcher found that Indonesia has a national interest that must be realized in the settlement of disputes with Australia, namely to enforce the security and sovereignty of Indonesia by making a code of ethics that aims to prevent Indonesia from the threat of wiretapping. Through these threats Indonesia has the opportunity to make new international agreements with Australia. Indonesia has the political capability to exploit violations committed by Australia to show its commitment to other countries in the Asia Pacific and ASEAN region, which is prioritizing peaceful dispute resolution, Indonesia is seen as a committed country.

**Key Words : Tapping, State Behaviour, Indonesia, Australia.**